


PERAN PEREKONOMIAN INDONESIA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI INTEGRASI SDGS DAN KEBIJAKAN PUBLIK NASIONAL

Anisah Harahap¹, Muzayyana², Robbani hafidz Lubis³,
Reni Ria Armayani Hasibuan⁴

Universitas Islam Negeri Sumatra Utara^{1, 2, 3, 4}

Email : anisahharahap33@gmail.com¹, robbanihafiz95@gmail.com³,
reniriaarmayani@uinsu.ac.id⁴

<p>Menerima: 29/12/2025</p> <p>Diterima: 30/12/2025</p> <p>Menerbitkan: 31/12/2025</p>  <p>This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstrak</p> <p><i>This study examines the role and challenges of Indonesia in achieving sustainable development in line with the Sustainable Development Goals (SDGs). Sustainable development in Indonesia is not solely focused on economic growth, but also emphasizes the balance between social equity, environmental protection, and good governance. This research employs a literature review method by analyzing national academic journals and policy documents related to sustainable development in Indonesia published after 2020. The findings indicate that Indonesia has demonstrated a strong commitment to sustainable development through the integration of the SDGs into national and regional development planning frameworks. However, the implementation process still faces several obstacles, including regional disparities, environmental degradation, limited institutional capacity, and suboptimal community participation. In addition, global challenges such as climate change and economic instability further affect the achievement of sustainable development targets in Indonesia. Therefore, strengthening evidence-based policies, enhancing cross-sectoral collaboration, and utilizing innovation and technology are essential to support inclusive and sustainable development. This study is expected to contribute both academically and practically to enriching the discourse on sustainable development in Indonesia and to provide insights for policymakers and stakeholders.</i></p> <p>Keywords: sustainable development, Indonesia, SDGs, public policy, environment. .</p>
---	--

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan menjadi paradigma utama dalam arah pembangunan Indonesia di tengah dinamika global yang ditandai oleh perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan tekanan ekonomi. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan besar untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Konsep pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan agar kebutuhan generasi saat ini dapat terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Dalam konteks Indonesia, komitmen terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) tercermin dalam berbagai kebijakan nasional dan daerah. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan struktural dan kelembagaan, terutama terkait kapasitas pemerintah daerah dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, kajian mengenai pembangunan berkelanjutan di Indonesia menjadi penting untuk memahami sejauh mana kebijakan dan praktik yang ada mampu menjawab tantangan pembangunan jangka panjang secara inklusif dan berkeadilan (Rahmawati, 2020).

Aspek ekonomi memegang peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan. Di

Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil belum sepenuhnya mampu menghilangkan kesenjangan pendapatan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap pembiayaan, pendidikan, dan lapangan kerja yang layak masih menjadi kendala utama bagi rumah tangga miskin untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Selain itu, sektor informal yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sering kali belum mendapatkan perlindungan dan peningkatan kapasitas yang memadai. Kondisi ini menuntut kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga pada kualitas pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi Indonesia perlu diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata (Nuryitnawan, 2020).

Dimensi sosial dalam pembangunan berkelanjutan mencakup isu pendidikan, literasi, dan penguatan kapasitas masyarakat. Pendidikan dan literasi memiliki peran strategis dalam membangun masyarakat yang produktif, berdaya saing, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Di Indonesia, upaya penguatan literasi tidak hanya dilakukan melalui sistem pendidikan formal, tetapi juga melalui peran institusi publik dan komunitas. Peningkatan literasi diyakini dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat serta memperluas partisipasi publik dalam pembangunan. Selain itu, penguatan kelas menengah menjadi indikator penting dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan karena kelompok ini berperan sebagai motor penggerak ekonomi dan stabilitas sosial. Namun, perlu diantisipasi agar pertumbuhan kelas menengah tidak memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pembangunan sosial harus dirancang secara inklusif dan berorientasi pada pemerataan manfaat pembangunan (Mahdi, 2020).

Pembangunan berkelanjutan juga sangat berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Indonesia menghadapi berbagai persoalan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran udara, dan degradasi lahan yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Salah satu isu lingkungan yang menonjol adalah perilaku pembakaran terbuka dan konsumsi energi rumah tangga yang tidak efisien. Kebijakan pemerintah, termasuk subsidi energi, sering kali memiliki dampak yang kompleks terhadap perilaku masyarakat. Ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan respons masyarakat dapat menciptakan kesenjangan pro-lingkungan yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, perumusan kebijakan lingkungan perlu mempertimbangkan faktor sosial dan perilaku masyarakat agar lebih efektif dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis bukti menjadi kunci dalam merancang kebijakan yang mampu mengubah perilaku menuju pola hidup yang lebih ramah lingkungan (Aufan, 2020).

Kemajuan teknologi dan adopsi inovasi digital juga menjadi faktor penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berpotensi meningkatkan efisiensi ekonomi, memperluas akses layanan publik, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, adopsi teknologi yang tidak merata dapat memperlebar kesenjangan antarwilayah dan kelompok sosial. Beberapa provinsi di Indonesia masih tertinggal dalam pemanfaatan TIK, sehingga manfaat transformasi digital belum dirasakan secara menyeluruh. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pembangunan berbasis teknologi perlu diiringi dengan kebijakan pemerataan akses dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, teknologi harus diposisikan sebagai alat untuk memperkuat inklusivitas pembangunan, bukan sebagai sumber ketimpangan baru dalam masyarakat (Patria & Erumban, 2020).

Pembangunan berkelanjutan di Indonesia juga memerlukan perencanaan wilayah dan infrastruktur yang terintegrasi. Perbedaan potensi ekonomi antarwilayah menuntut strategi pembangunan yang kontekstual dan berbasis keunggulan lokal. Penentuan sektor unggulan daerah, pengelolaan infrastruktur perkotaan, serta perencanaan energi menjadi aspek penting

dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Di daerah terpencil dan kepulauan, tantangan ketersediaan energi dan infrastruktur menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi produktif. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus mempertimbangkan karakteristik geografis dan sosial wilayah agar hasil pembangunan dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Pendekatan perencanaan yang adaptif dan partisipatif diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kebijakan pembangunan daerah (Moristanto & Setiandanu, 2020).

Dalam menghadapi tantangan masa depan, pembangunan berkelanjutan di Indonesia perlu berorientasi pada inovasi dan kesiapan generasi muda. Generasi Z memiliki potensi besar dalam mendukung transisi menuju ekonomi hijau melalui pemanfaatan teknologi dan pengembangan pekerjaan ramah lingkungan. Selain itu, inovasi di sektor pertanian perkotaan dan ekonomi hijau menunjukkan peluang baru dalam mendukung ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan di kawasan perkotaan. Integrasi antara kebijakan pemerintah, peran masyarakat, dan kesiapan sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Dengan memperkuat sinergi tersebut, Indonesia diharapkan mampu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan secara lebih efektif dan berdaya saing global. Oleh karena itu, kajian akademik mengenai pembangunan berkelanjutan tetap relevan sebagai dasar perumusan kebijakan yang adaptif dan visioner (Yuliana & Zubaidah, 2025).

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Konsep ini lahir sebagai respons terhadap model pembangunan konvensional yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, pembangunan berkelanjutan menjadi kerangka penting untuk memastikan bahwa proses pembangunan tidak memperdalam ketimpangan sosial maupun merusak lingkungan. Pendekatan ini menuntut adanya integrasi kebijakan lintas sektor serta partisipasi berbagai pemangku kepentingan. Pembangunan berkelanjutan juga menekankan pentingnya keberlanjutan antargenerasi, di mana pemanfaatan sumber daya saat ini tidak boleh mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan dipahami sebagai proses jangka panjang yang memerlukan perencanaan matang dan tata kelola yang baik (Suprpto & Manshur, 2020).

Dalam implementasinya, pembangunan berkelanjutan di Indonesia menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Keterbatasan kapasitas kelembagaan, perbedaan tingkat pembangunan antarwilayah, serta lemahnya koordinasi kebijakan sering kali menghambat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, tekanan global seperti perubahan iklim dan krisis ekonomi turut memengaruhi stabilitas pembangunan nasional. Oleh sebab itu, teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya pendekatan kontekstual yang disesuaikan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan lingkungan masing-masing wilayah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan melalui perencanaan pembangunan yang adaptif dan berbasis potensi lokal. Dengan demikian, pemahaman teoritis tentang pembangunan berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan Indonesia ke depan (Rahmawati, 2020).

2.2. Teori Pembangunan Ekonomi Inklusif

Pembangunan ekonomi inklusif merupakan pendekatan pembangunan yang menekankan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Teori ini menolak asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi secara otomatis akan menurunkan kemiskinan dan ketimpangan. Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil belum sepenuhnya diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan. Kelompok masyarakat miskin dan pekerja sektor informal masih menghadapi keterbatasan akses terhadap modal, pendidikan, dan perlindungan sosial. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi inklusif menekankan pentingnya kebijakan yang mendukung penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan akses pembiayaan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan pendekatan ini, pembangunan ekonomi diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan berkeadilan (Nuryitmawan, 2020).

Dalam praktiknya, pembangunan ekonomi inklusif di Indonesia membutuhkan peran aktif pemerintah dalam mengintervensi pasar melalui kebijakan fiskal dan sosial. Subsidi, kredit mikro, dan program perlindungan sosial merupakan instrumen penting untuk mendukung kelompok rentan agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Namun, efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada desain dan implementasinya. Tanpa pengawasan dan evaluasi yang memadai, kebijakan ekonomi justru dapat menciptakan ketergantungan dan distorsi pasar. Oleh karena itu, teori pembangunan inklusif menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti dan evaluasi berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan angka makro, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Dodi Satriawan, 2023).

2.3. Teori Pembangunan Sosial dan Literasi

Pembangunan sosial merupakan dimensi penting dalam pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup manusia. Teori pembangunan sosial menekankan peran pendidikan, kesehatan, dan literasi sebagai fondasi utama pembangunan manusia. Literasi tidak hanya dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga sebagai kapasitas individu dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kesejahteraan. Di Indonesia, penguatan literasi masyarakat memiliki dampak signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi dan partisipasi sosial. Literasi yang baik memungkinkan masyarakat untuk mengakses peluang ekonomi, memahami kebijakan publik, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan sosial yang berkelanjutan harus menempatkan literasi sebagai strategi utama dalam meningkatkan kapasitas masyarakat (Mahdi, 2020).

Selain literasi, penguatan kelas menengah juga menjadi fokus dalam teori pembangunan sosial. Kelas menengah memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi dan penjaga stabilitas sosial. Namun, pertumbuhan kelas menengah yang tidak diiringi dengan pemerataan kesempatan dapat memperlebar kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pembangunan sosial berkelanjutan menuntut kebijakan yang memastikan mobilitas sosial yang adil dan inklusif. Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau menjadi instrumen utama dalam mendorong mobilitas sosial tersebut. Dengan demikian, teori pembangunan sosial menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan keadilan sosial dalam distribusi manfaat pembangunan (Shasta Pratomo et al., 2020).

2.4. Teori Perilaku Lingkungan dan Kebijakan Publik

Teori perilaku lingkungan menjelaskan bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan memengaruhi perilaku individu dalam menjaga lingkungan hidup. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci dalam mengurangi degradasi lingkungan. Kebijakan publik seperti subsidi energi dan regulasi lingkungan memiliki pengaruh signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat. Namun,

kebijakan yang tidak selaras dengan perilaku dan nilai masyarakat dapat menimbulkan kesenjangan pro-lingkungan. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya memahami perilaku masyarakat dalam merancang kebijakan lingkungan yang efektif. Di Indonesia, tantangan utama terletak pada bagaimana kebijakan pemerintah mampu mendorong perubahan perilaku menuju pola hidup yang lebih ramah lingkungan (Aufan, 2020).

Selain perilaku konsumsi energi, praktik pembakaran terbuka juga menjadi isu lingkungan yang serius. Teori kebijakan lingkungan menyoroti perlunya pendekatan terpadu antara regulasi, insentif, dan edukasi publik. Tanpa dukungan kesadaran masyarakat, kebijakan lingkungan cenderung tidak efektif. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan memerlukan sinergi antara kebijakan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Pendekatan berbasis komunitas dan edukasi lingkungan menjadi strategi penting dalam menginternalisasi nilai-nilai keberlanjutan. Dengan demikian, teori perilaku lingkungan memberikan landasan penting dalam memahami hubungan antara kebijakan publik dan praktik lingkungan masyarakat (Putri, 2020).

2.5. Teori Teknologi dan Ketimpangan Pembangunan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Teori teknologi dalam pembangunan menekankan bahwa adopsi teknologi dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akses terhadap layanan publik. Namun, adopsi teknologi yang tidak merata berpotensi menciptakan ketimpangan baru. Di Indonesia, kesenjangan digital antarwilayah masih menjadi tantangan utama. Wilayah perkotaan cenderung lebih cepat mengadopsi teknologi dibandingkan daerah tertinggal. Oleh karena itu, teori pembangunan berbasis teknologi menekankan pentingnya kebijakan pemerataan akses dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar teknologi dapat menjadi alat inklusi, bukan eksklusif (Patria & Erumban, 2020).

Selain itu, kesiapan generasi muda dalam memanfaatkan teknologi menjadi faktor kunci dalam pembangunan berkelanjutan. Generasi Z memiliki potensi besar dalam mendorong inovasi dan transformasi ekonomi hijau. Namun, tanpa dukungan pendidikan dan kebijakan yang tepat, potensi tersebut tidak akan optimal. Oleh karena itu, teori teknologi dan pembangunan menekankan pentingnya investasi pada pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Dengan demikian, teknologi dapat berperan sebagai katalisator pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berdaya saing global (Yuliana, 2025).

2.6. Teori Perencanaan Wilayah dan Infrastruktur

Teori perencanaan wilayah menekankan pentingnya pendekatan spasial dalam pembangunan berkelanjutan. Setiap wilayah memiliki karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda, sehingga memerlukan strategi pembangunan yang kontekstual. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan antarwilayah menjadi tantangan utama pembangunan. Perencanaan wilayah yang efektif harus mampu mengoptimalkan potensi lokal dan mengurangi kesenjangan pembangunan. Infrastruktur yang memadai menjadi prasyarat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, teori perencanaan wilayah menekankan pentingnya integrasi antara perencanaan tata ruang dan kebijakan pembangunan (Rosadi, 2020).

Selain infrastruktur, perencanaan energi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan wilayah berkelanjutan. Di wilayah terpencil dan kepulauan, keterbatasan akses energi menjadi penghambat utama pembangunan ekonomi produktif. Oleh karena itu, perencanaan energi berkelanjutan harus mempertimbangkan sumber energi lokal dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemandirian energi, tetapi juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, teori

perencanaan wilayah memberikan kerangka penting dalam merancang pembangunan yang adaptif dan berkelanjutan (Moristanto & Setiandanu, 2020).

2.7. Teori Inovasi dan Pembangunan Berkelanjutan Masa Depan

Teori inovasi dalam pembangunan berkelanjutan menekankan peran kreativitas dan teknologi dalam menjawab tantangan pembangunan masa depan. Inovasi tidak hanya terbatas pada teknologi, tetapi juga mencakup model bisnis, kebijakan, dan praktik sosial yang baru. Dalam konteks Indonesia, inovasi di sektor pertanian perkotaan, ekonomi hijau, dan pengelolaan sumber daya menjadi peluang strategis untuk mendukung keberlanjutan. Rooftop farming, misalnya, menjadi solusi inovatif dalam meningkatkan ketahanan pangan perkotaan sekaligus mengurangi tekanan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, teori inovasi menekankan pentingnya ekosistem inovasi yang mendukung kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat (Zubaidah et al., 2025).

Selain itu, inovasi memerlukan dukungan kebijakan yang adaptif dan visioner. Tanpa regulasi yang mendukung, inovasi sulit berkembang secara berkelanjutan. Oleh karena itu, teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi. Dengan mengintegrasikan inovasi ke dalam perencanaan pembangunan nasional, Indonesia diharapkan mampu menghadapi tantangan global secara lebih efektif. Dengan demikian, teori inovasi memberikan arah strategis bagi pembangunan berkelanjutan Indonesia di masa depan (Cahyono & Tokuda, 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur untuk mengkaji isu pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep, kebijakan, dan implementasi pembangunan berkelanjutan berdasarkan kajian ilmiah yang telah ada. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari jurnal ilmiah nasional terakreditasi, khususnya artikel yang dipublikasikan setelah tahun 2020 dan relevan dengan topik pembangunan berkelanjutan, ekonomi inklusif, lingkungan hidup, serta perencanaan pembangunan. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran basis data jurnal nasional dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan dan Indonesia. Seluruh literatur yang dikumpulkan kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian topik, kredibilitas sumber, serta kelengkapan informasi ilmiah untuk memastikan validitas dan relevansi data yang digunakan dalam penelitian.

Metode penelitian ini juga mencakup tahapan analisis data secara deskriptif-kualitatif, di mana data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara mengelompokkan tema, konsep, dan temuan utama dari setiap sumber pustaka. Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai pandangan dan hasil penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, serta implikasi kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Tahap ini bertujuan untuk mensintesis informasi sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh dan sistematis. Selanjutnya, hasil analisis disajikan dalam bentuk narasi ilmiah yang terstruktur untuk menjelaskan hubungan antara teori dan praktik pembangunan berkelanjutan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan mendalam mengenai kondisi pembangunan berkelanjutan di Indonesia serta menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pembangunan berkelanjutan di Indonesia berdasarkan kajian literatur yang telah dianalisis. Fokus utama pembahasan meliputi dimensi ekonomi, sosial,

lingkungan, kebijakan, serta inovasi yang saling berkaitan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dilihat sebagai suatu sistem yang melibatkan berbagai aktor dan sektor. Setiap kebijakan dan program pembangunan memiliki implikasi yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pembahasan disajikan secara tematik untuk memudahkan pemahaman hubungan antar aspek pembangunan berkelanjutan. Penyajian dalam bentuk tabel bertujuan untuk merangkum hasil kajian secara sistematis, sedangkan uraian naratif digunakan untuk menjelaskan makna dan implikasi dari setiap temuan secara mendalam dan kontekstual.

Tabel 1.
 Dimensi Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

No	Dimensi	Fokus Utama	Implikasi Pembangunan
1	Ekonomi	Pertumbuhan inklusif	Peningkatan kesejahteraan
2	Sosial	Keadilan dan literasi	Penguatan kapasitas masyarakat
3	Lingkungan	Perlindungan sumber daya	Keberlanjutan ekosistem
4	Tata kelola	Kebijakan dan regulasi	Efektivitas implementasi
5	Inovasi	Teknologi dan kreativitas	Daya saing jangka panjang

Tabel 1 menggambarkan dimensi utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dimensi ekonomi menekankan pentingnya pertumbuhan yang inklusif agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dimensi sosial berfokus pada keadilan sosial, peningkatan literasi, serta penguatan kapasitas manusia sebagai subjek pembangunan. Sementara itu, dimensi lingkungan menyoroti perlunya perlindungan terhadap sumber daya alam sebagai dasar keberlanjutan jangka panjang. Tata kelola menjadi elemen penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan, sedangkan inovasi berperan sebagai penggerak utama dalam menghadapi tantangan pembangunan masa depan. Kelima dimensi ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik dan terintegrasi.

Hubungan antar dimensi dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa kegagalan pada satu aspek dapat memengaruhi keberhasilan aspek lainnya. Misalnya, pertumbuhan ekonomi tanpa perlindungan lingkungan dapat menyebabkan degradasi sumber daya alam yang pada akhirnya merugikan masyarakat. Demikian pula, kebijakan yang baik tanpa dukungan inovasi dan teknologi akan sulit menjawab tantangan global yang terus berkembang. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan di Indonesia harus dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antar dimensi tersebut. Pendekatan ini menuntut sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta agar tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan.

Tabel 2.
 Peran Aktor dalam Pembangunan Berkelanjutan

No	Aktor	Peran Utama	Kontribusi
1	Pemerintah	Perumusan kebijakan	Arah pembangunan
2	Masyarakat	Partisipasi aktif	Implementasi lapangan
3	Swasta	Investasi dan inovasi	Efisiensi ekonomi
4	Akademisi	Kajian ilmiah	Basis pengetahuan
5	Komunitas	Penguatan lokal	Keberlanjutan sosial

Tabel 2 menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan berbagai aktor. Pemerintah berperan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang menjadi arah pembangunan nasional dan daerah. Masyarakat

berperan sebagai pelaksana sekaligus penerima manfaat pembangunan, sehingga partisipasi aktif menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Sektor swasta memberikan kontribusi melalui investasi dan inovasi yang mendorong efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Akademisi berperan dalam menyediakan kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan keputusan, sementara komunitas lokal memperkuat keberlanjutan sosial melalui kearifan lokal dan solidaritas sosial.

Kolaborasi antar aktor dalam Tabel 2 menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Tanpa sinergi yang baik, kebijakan pembangunan berpotensi tidak efektif atau bahkan menimbulkan konflik kepentingan. Peran komunitas dan masyarakat menjadi penting untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai kebutuhan lokal. Di sisi lain, kontribusi akademisi dan sektor swasta memperkaya perspektif dan solusi yang ditawarkan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan di Indonesia membutuhkan tata kelola kolaboratif yang mampu mengintegrasikan peran dan kepentingan seluruh aktor secara seimbang.

Tabel 3.
Tantangan Pembangunan Berkelanjutan

No	Aspek	Tantangan	Dampak
1	Ekonomi	Ketimpangan wilayah	Kesenjangan sosial
2	Sosial	Akses pendidikan	Kualitas SDM
3	Lingkungan	Degradasi alam	Penurunan kualitas hidup
4	Kebijakan	Koordinasi lemah	Implementasi tidak optimal
5	Teknologi	Kesenjangan digital	Ketidakmerataan manfaat

Tabel 3 mengidentifikasi berbagai tantangan utama yang dihadapi Indonesia dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Ketimpangan wilayah menjadi persoalan ekonomi yang berdampak pada kesenjangan sosial. Dalam aspek sosial, keterbatasan akses pendidikan memengaruhi kualitas sumber daya manusia. Tantangan lingkungan berupa degradasi alam mengancam keberlanjutan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, lemahnya koordinasi kebijakan antar lembaga sering menghambat efektivitas implementasi pembangunan. Kesenjangan teknologi juga menjadi tantangan tersendiri dalam era digital.

Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan adaptif. Setiap tantangan saling berkaitan dan tidak dapat diselesaikan secara terpisah. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan harus dirancang secara terintegrasi dengan mempertimbangkan konteks lokal dan global. Pemahaman terhadap tantangan ini menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

Tabel 4.
Strategi Pembangunan Berkelanjutan

No	Strategi	Pendekatan	Tujuan
1	Kebijakan inklusif	Berbasis bukti	Pemerataan
2	Penguatan SDM	Pendidikan dan literasi	Daya saing
3	Perlindungan lingkungan	Regulasi dan edukasi	Keberlanjutan
4	Inovasi teknologi	Digitalisasi	Efisiensi
5	Kolaborasi	Multi-aktor	Keberhasilan bersama

Tabel 4 menyajikan strategi utama yang dapat diterapkan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kebijakan inklusif berbasis bukti diperlukan untuk memastikan pemerataan manfaat pembangunan. Penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan literasi menjadi fondasi penting dalam meningkatkan daya saing bangsa. Perlindungan lingkungan melalui regulasi dan edukasi publik bertujuan menjaga

keberlanjutan sumber daya alam. Inovasi teknologi mendukung efisiensi dan efektivitas pembangunan, sementara kolaborasi multi-aktor memperkuat implementasi strategi pembangunan.

Penerapan strategi dalam Tabel 4 memerlukan komitmen jangka panjang dan konsistensi kebijakan. Tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan, strategi pembangunan berkelanjutan sulit mencapai hasil optimal. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan, sumber daya manusia, teknologi, dan kolaborasi menjadi kunci utama keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan multidimensional yang menuntut keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, lingkungan, tata kelola, dan inovasi. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka kebijakan yang relatif kuat dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti ketimpangan wilayah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta degradasi lingkungan. Selain itu, keberhasilan pembangunan berkelanjutan sangat dipengaruhi oleh sinergi antaraktor, baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta, maupun akademisi. Penguatan kebijakan yang inklusif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi secara merata, serta perlindungan lingkungan yang konsisten menjadi faktor kunci dalam mendorong keberlanjutan pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang, pembangunan berkelanjutan di Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil sekaligus menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang.

REFERENSI

- Aufan, D. A. (2020). The influence of government subsidy and pro-environmental gaps on electricity-saving behaviors of households in Indonesia. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(3), 295–306. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i3.88>
- Cahyono, T. W., & Tokuda, H. (2024). Sociodemographic Factors and Policy Implications for Improved Food Security. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v5i1.495>
- Dodi Satriawan. (2023). Overview of Informal Sector Workers Viewed from Education Variables. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 4(3), 318–327. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v4i3.372>
- Mahdi, R. (2020). Strengthening community economy inclusively through literacy for prosperity: National Library of Indonesia's role to support Sustainable Development Goals (SDGs). *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(2), 160–176. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i2.62>
- Moristanto, M., & Setiandanu, G. T. (2020). Sustainable development of energy supply planning for productive economy in isolated island. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(2), 209–216. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i2.71>
- Nuryitnawan, T. R. (2020). Can credit recipient household escape from poverty? *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(3), 225–240. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i3.84>

- Patria, H., & Erumban, A. A. (2020). Impact of ICT adoption on inequality evidence from Indonesian provinces. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(2), 125–139. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i2.58>
- Putri, M. W. N. (2020). Interconnecting issue of government's regional budget allocation and open burning behavior: Study from Indonesia. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(3), 258–266. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i3.87>
- Rahmawati, Y. D. (2020). The capacity of Kulon Progo Regency government in efforts to self-sustaining economic development. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(2), 177–192. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i2.56>
- Rosadi, A. (2020). Determining leading economic sectors by large distribution or extreme growth? Case of Tulungagung Regency. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(2), 140–159. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i2.59>
- Sari, W. N., Ichiki, A., Shimizu, T., & Dewanti. (2020). The implementation of urban drainage maintenance to reduce inundation risk: Case study in Tegal, Indonesia. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(3), 241–257. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i3.77>
- Shasta Pratomo, D., Syafitri, W., & Anindya, C. S. (2020). Expanding middle class in Indonesia. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(3), 307–312. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i3.103>
- Suprpto, F. A., & Manshur, A. (2020). Policy paper: A review of Suramadu regional development acceleration towards sustainable development concept. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 1(2), 193–208. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v1i2.72>
- Yuliana, F. M. A., & ... (2025). Analysis of Gen Z's readiness to leverage AI in green jobs. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 6(2), 149–172. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i2.615>
- Zubaidah, A. F., et al. (2025). Characteristics and strategies of rooftop farming in Jakarta for sustainable development. *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning*, 6(2), 328–346. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i2.648>